

ADNAN BUYUNG NASUTION & PARTN
Law

PROF.DR (IUR). ADNAN BUYUNG NASUTION
FIAT JUSTITIA RUAT CAELUM

“Menegakkan Kebenaran dan Keadilan Sekalipun Langit Runtuh”

”**M**enjadi advokat bukanlah untuk mencari uang atau nafkah, melainkan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran,” kata Adnan Buyung Nasution kepada majalah *INTEGRITAS*.

Percakapan dengan Adnan Buyung berlangsung di kantornya di Altoms Building, kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Menurut pengacara beken itu, berbeda dengan advokat zaman dulu, para advokat zaman sekarang menunjukkan keberhasilan melalui bergelimpangnya harta kekayaan tapi tidak memberi manfaat apa-apa untuk masyarakat.

Abang (begitulah dia biasa disapa) betul-betul kecewa melihat penegakan hukum di masa kini. Sebab, sejak menjadi mahasiswa tahun 1950-an, ia selalu berikrar ingin menjadikan Indonesia negara yang berwibawa, bersih dari korupsi, tetapi tak kunjung berhasil.

ADNAN BUYUNG RISAU MELIHAT MINIMNYA KOMITMEN ADVOKAT MEMPERTAHAKAN NILAI-NILAI IDEALISME DALAM MENEGAKKAN KEADILAN.

Menurut dia, pemberantasan korupsi yang terjadi saat ini hanya upaya tambal sulam atau tak lebih dari *shock therapy*, tidak sampai menyeluruh sampai ke akar-akarnya.

“Semua pejabat yang pernah memegang pimpinan *policy* hukum di negara kita, tak ada yang benar-benar punya nyali dan kemauan besar serta kemampuan untuk memberantas korupsi,” kata pria kelahiran 20 Juli 1934 ini.

Satu-satunya orang yang dikaguminya sebagai aparaturnegara yang tegas menegakkan hukum adalah Kolonel Zulkifli Lubis. Sekalipun bukan orang hukum, Zulkifli yang menjabat Kepala

Pusat Intelijen Angkatan Darat era tahun 1950-an pernah melakukan cara-cara ekstra-yudisial dalam mengembalikan kewibawaan negara.

Ketika itu Kolonel Zulkifli tahu persis bahwa hukum di Indonesia pada saat itu sudah mandul maka ia pun langsung menculik pejabat negara atau pengusaha korup di kegelapan malam lalu dibawa ke Bandung dan paginya diserahkan ke Jaksa Agung untuk diproses secara hukum. Kedengarannya memang radikal, tapi untuk kondisi hukum di Indonesia saat ini, Buyung menilai perlu dilakukan cara-cara di luar ketentuan demi efektivitas.

Berdasarkan pengamatan dan pengalamannya selama ini, pemberantasan korupsi di Indonesia hanya berada di permukaan. Dalam kaitan itu dia menyebut contoh kasus Gayus Tambunan, kliennya, yang tidak ditindaklanjuti, padahal kasusnya sudah dibongkar di pengadilan dengan hakim berkualitas, Albertina Ho. Padahal, perusahaan-perusahaan yang menyuap juga sudah dipaparkan.

“Jadi, ini menunjukkan bahwa memang upaya pemberantasan korupsi secara tuntas tidak jalan. Setelah ketemu, ya sudah. Padahal, kalau kita memberantas korupsi, harus sampai ke akar-akarnya,” ujar Buyung.

Lantas, bagaimana pendapatnya tentang pemiskinan koruptor? Efektifkah? Buyung tidak setuju cara tersebut diterapkan. Alasannya, makna “pemiskinan” berkonotasi negatif seolah berniat jahat ingin menghukum seseorang secara berlebihan. Orang dihukum untuk menegakkan keadilan sehingga hukumnya harus setimpal dengan kesalahan.

“Apa ukurannya kalau dia dimiskinkan, dan apa adilnya kalau dia sampai melarat di jalanan? *Kan* tidak betul. Jadi, hukuman harus setimpal dengan kesalahan, itulah keadilan,” tandas Buyung.

Kalau hukuman bisa membuat koruptor sangat miskin, itu adalah risiko dan bukan tujuan. Yang adil menurut dia adalah penyitaan semua harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan. Jika tidak disita, itu berarti kesalahan penyidik karena tidak teliti. “Dan ada batasan juga, hanya harta yang berasal dari kejahatan dan yang dipakai untuk kejahatan. Bukan harta lain yang mungkin berasal dari nenek moyangnya.”

Buyung menduga gagasan memiskinkan koruptor muncul karena masyarakat sangat kesal melihat perilaku koruptor. “Ini adalah tren, tetapi saya tidak setuju. Tujuan memberantas korupsi

kan menegakkan keadilan, tapi kalau kita memberantas korupsi dengan berbuat ketidakadilan, ya sama saja.”

Yang paling penting adalah adanya satu komando untuk memberantas korupsi bagi seluruh jajaran penegak hukum. Ia yakin korupsi bisa diberantas di negeri ini asalkan pemerintah mau bersungguh-sungguh, bernyali, tegas, dan dirinya sendiri juga bersih.

Pemberantasan korupsi menjadi sulit karena pelaksanaan undang-undang tidak memadai. Dari segi konsep sudah cukup bagus sehingga tak perlu lagi ada undang-undang. Yang paling penting adalah adanya satu komando untuk memberantas korupsi bagi seluruh jajaran penegak hukum. Ia yakin korupsi bisa diberantas di negeri ini asalkan pemerintah mau bersungguh-sungguh, bernyali, tegas, dan dirinya sendiri juga bersih. “Masalahnya sekarang kita belum dapat orang-orang seperti itu dalam pemerintahan. Karena kalau kita misalnya tidak bersih, dulu *record*-nya jelek, bagaimana bisa bertindak tegas pada orang lain?”

Dimintai pendapatnya mengenai sepak terjang KPK di bawah kepemimpinan Abraham Samad, Buyung berusaha menahan diri. Mengapa? Sebab, ia tidak terlalu mengenal Abraham Samad. Selain itu, ia sedang menunggu gebrakan KPK dalam menangani kasus Century, Hambalang dan kasus besar lainnya yang menyerat banyak tokoh nasional “*Apa follow up*-nya, jadi orang bisa lihat, ini betul-betul atau tidak.”

Sebagai bapak advokat tak lupa pula ia menanggapi masalah polemik organisasi profesi advokat yang tak kunjung usai. Buyung adalah salah satu penggagas Undang-Undang Advokat. Ditengarai undang-undang tersebut menjadi akar dari konflik berbagai organisasi profesi advokat karena mereka tidak menginginkan wadah tunggal.

Secara jujur Buyung mengungkapkan bahwa ia merasa gagal menyatukan para advokat di Indonesia karena ia melihat kepentingan prestise dan pribadi jauh lebih besar daripada kepentingan profesi. Sudah waktunya semua organisasi profesi berpikir kembali bagaimana supaya advokat bisa berwibawa lagi.

Tentang hal itu dia mengatakan, “Kalau sekarang ada advokat yang tidak benar, minta tanggung jawab siapa? Tidak ada dewan kehormatan. Harusnya *kan* ada dewan kehormatan sehingga bisa diadukan dan diadili.” Dan ia berharap seluruh organisasi profesi melepaskan bajunya masing-masing lalu membicarakan kembali masalah ini untuk mencari solusi terbaik.

Mendapat gelar “Bapak Advokat” menggambarkan perjalanan panjang seorang advokat yang selama ini tak kenal lelah menegakkan prinsip kebenaran dan keadilan. Nama lengkap pria kelahiran Jakarta ini Adnan Bahrum Nasution. Lantas, dari mana *Buyung*-nya? Ternyata perekatan nama Buyung di tengah namanya itu terjadi ketika dia menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 1964. Waktu itu petugas administrasi yang kerap mendengar sapaan Buyung terhadap si Abang langsung saja menulis namanya, Adnan B. Nasution, sebagai Adnan Buyung Nasution. Nama itulah yang kemudian dikenal banyak orang.

Buyung lahir di Jakarta, 20 Juli 1934. Hidupnya sarat dengan tantangan. Sejak kecil, umur dua belas tahun, ia bersama adik satu-satunya Samsi Nasution sudah harus menjadi pedagang kali

lima menjual barang loakan di Pasar Kranggan, Yogyakarta. Di pasar itu pula ibunya, Ramlah Dougur Lubis, berjualan cendol. Sementara ayahnya, R. Rachmat Nasution, bergerilya melawan Belanda dalam Clash II pada 1947-1948.

Sejak kecil, ia menjadikan ayahnya sebagai teladan. Kebanggaan Buyung tentu beralasan. Ayahnya memang sosok pejuang sejati: tidak hanya berjuang lewat gerilya, tetapi juga lewat informasi. Rachmat Nasution adalah salah seorang pendiri Kantor Berita *Antara* dan harian *Kedaulatan Rakyat*. Ayahnya pula yang merintis berdirinya harian berbahasa Inggris *The Time of Indonesia*.

Lulus SMA, Buyung hijrah ke Bandung dan mendaftar di Institut Teknologi Bandung (ITB), Jurusan Teknik Sipil. Di sana ia aktif di Perhimpunan Mahasiswa Bandung. Tetapi ia hanya bertahan setahun di ITB, lalu pindah ke Fakultas Gabungan Hukum, Ekonomi, dan Sosial Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Tidak lama di situ, pada 1957 ia pindah lagi ke Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan, Universitas Indonesia, Jakarta.

Lulus sarjana muda, sambil meneruskan kuliah, ia bekerja sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Istimewa Jakarta. Sekalipun sudah menjadi jaksa, semangatnya sebagai aktivis tidak pudar. Ketika itu ia sempat mendirikan sekaligus menjadi Ketua Gerakan Pelaksana Ampera. Selain itu, ia juga menjadi anggota Komando Aksi Penggayangan Gestapu. Bersama Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) ia ikut turun ke jalan sehingga diinterogasi oleh atasannya. Bahkan, pernah dirumahkan selama satu setengah tahun alias diskorsing dari pekerjaannya sebagai jaksa. Ia tidak diberi pekerjaan dan tidak diberi meja di kantor. Buyung dituduh anti revolusi, anti Manipol-Usdek.

Kemudian ia mendapat surat pindah tugas ke Manado. Lucunya, ia ditempatkan di Medan. Entah

bagaimana, Buyung tidak srek, dan pada 1968 ia menanggalkan baju jaksa. Selain itu, ia juga di-recall dari DPR/MPR. Sekitar setahun ia menganggur kemudian membentuk Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta. Untuk mendukung kerja LBH, ia membuka kantor pengacara (advokat). Sekali jalan, dua-duanya berkembang. Kantor pengacaranya merupakan salah satu kantor pengacara terbaik di Indonesia. Sementara itu, LBH--kemudian menjadi YLBHI dan membawahi LBH-LBH--pun tumbuh besar

Soal pendirian LBH ini ia punya cerita menarik. Ketika ia menjadi jaksa dan bersidang di daerah-daerah terpencil, ia melihat orang-orang yang menjadi terdakwa pasrah saja menerima dakwaan yang ditimpakan kepadanya. Dari sana ia berpikir, orang-orang kecil yang buta hukum itu perlu dibantu. Tetapi niat itu dipendamnya.

Saat kuliah di Universitas Melbourne, Australia, ia melihat bahwa di negara itu ada Lembaga Bantuan Hukum. Itu membuatnya sadar bahwa bantuan hukum itu ada pola, model, dan bentuknya. Pada 1969, ia kembali ke Indonesia. Kemudian ia menyampaikan ide itu kepada Kepala Kejaksaan Agung Soeprapto. Soeprapto memang memuji ide itu, tetapi ia menganggap belum waktunya diwujudkan. Buyung menyadari saat itu memang belum mendukung gagasan tersebut.

Ia baru bisa merealisasikan idenya membentuk LBH setelah ia keluar dari Kejaksaan. Mula-mula gagasan itu dilontarkan kepada Profesor Sumitro dan Mochtar Lubis. Rupanya, Sumitro dan Mochtar cukup antusias mendukung ide itu. Selanjutnya, Adnan yang izin praktik advokatnya sempat dicabut itu menemui Menteri Kehakiman Prof Oemar Seno Adjie untuk mengkonsultasikan ide itu.

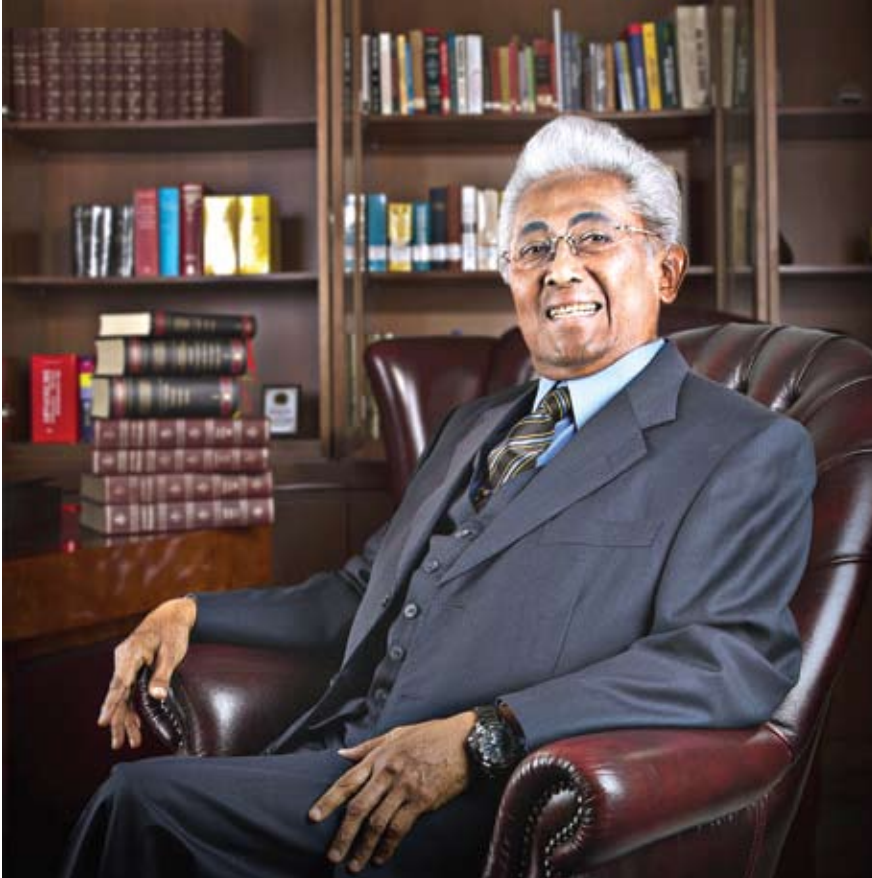
Rupanya Pak Menteri juga mendukung tapi menyarankan Adnan mejadi advokat dulu supaya punya legalitas. Tanpa proses yang rumit, Buyung

Bersama Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) ia ikut turun ke jalan sehingga diinterogasi oleh atasannya. Bahkan, pernah dirumahkan selama satu setengah tahun alias diskorsing dari pekerjaannya sebagai jaksa. Ia tidak diberi pekerjaan dan tidak diberi meja di kantor. Buyung dituduh anti revolusi, anti Manipol-Usdek.

pun mendapatkan izin advokat, dan membuka kantor *law firm*. Tak lupa, ia juga mengajak beberapa temannya menjadi staf, seperti Nono Anwar Makarim, Mari'e Muhammad (bekas Menteri Keuangan). Kantor itu kemudian berkembang.

Kemudian, mulailah Buyung menyiapkan pendirian LBH. Ia mulai melakukan pendekatan dengan sejumlah advokat untuk mensosialisasi ide itu. Buyung tidak mau ada ganjalan untuk mewujudkan gagasannya. Soalnya, menurut Buyung, di beberapa negara LBH dimusuhi para advokat. Tetapi syukur, ia tidak punya ganjalan apa-apa. Peserta Kongres Peradin (Persatuan Advokat Indonesia), terutama Yap Thiam Hien dan Lukman Wiryadinata (bekas Menteri Kehakiman), mendukung penuh gagasan itu.

Buyung juga melakukan pendekatan dengan pihak pemerintah. Ia menemui Ali Moertopo yang waktu itu menjadi asisten pribadi Presiden Soeharto dan menjelaskan ide itu seraya meminta ide itu disampaikan kepada presiden, apakah presiden setuju atau tidak.



Rupanya tak lama, ia dipanggil dan mendapat kabar bahwa Soeharto setuju dengan gagasan itu. Malah, ketika pembukaan LBH ia mendapat 10 skuter dari pemerintah.

Selain pemerintah pusat, Buyung juga mendekati pemerintah daerah DKI Jakarta. Ia menemui Ali Sadikin yang waktu itu menjadi gubernur. Rupanya, Ali juga satu suara dengan yang lain. Bahkan, yang mendukung bukan Ali sebagai pribadi, tetapi pemerintah daerah DKI Jakarta. Karena dukungan-dukungan itu, kemudian lahirlah LBH tanggal 28 Oktober 1970. Buyung pun tampil sebagai pemimpin LBH pertama kali.

Kasus apa yg paling berkesan bagi Buyung? Kasus paling berkesan buatnya adalah ketika ia membela seluruh Dewan Mahasiswa di delapan kota dalam kasus Buku Putih Mahasiswa Indonesia . Di antaranya mahasiswa ITB, UI, USU, UGM, UNPAD, Makassar.

“Saya pimpin 80 advokat untuk membela mahasiswa dengan uang saya sendiri dan mengongkosi mereka pulang balik antar kota,” kenang Buyung yang mengaku cukup puas dengan kinerjanya.

Ada juga kasus saat ia membela Darsono yang membuat Petisi 50 yang mempertanyakan apa yang terjadi di Priok dan apa upaya pemerintah supaya tidak terjadi lagi (red- kasus tanjung priok), tapi Darsono dituduh subversif. Karena kasus tersebut, pemerintah tidak senang pada Buyung yang membuat seolah-olah Darsono menjadi pahlawan ketika ia disambut ratusan orang saat keluar dari penjara. Akibatnya lisensi advokatnya dicabut.

Itulah masa yang sulit bagi Buyung dan keluarganya. Ia harus pergi ke Belanda, di sisi lain keluarganya harus bersabar karena rumah, mobil, semuanya dijual. Bahkan ia kesulitan menyekolahkan putridbungsunya. Untungnya masih ada teman-temannya yang ikut membantu. Selama di Belanda lebih kurang tujuh tahun lamanya, Buyung tidak ditengok teman-temannya karena dilarang Duta Besar Indonesia di Belanda. Sebelum membela kasus Darsono, Buyung juga sempat dipenjara selama setahun dari tahun 1974-1975 karena menjadi aktivis Malari.

Bagaimana dengan pengalamannya saat menjadi penasehat Presiden SBY? Ketika ia menjadi penasehat presiden,

ia punya kewajiban memberi nasehat kepada Presiden baik diminta ataupun tidak. Ada yang diterima, ada yang tidak, dan ada juga yang dilaksanakan dengan baik. Salah satu nasehat Buyung yang diterima Presiden adalah di bidang hukum. Waktu itu ada desakan supaya korupsi diberantas di tingkat istana. Lalu Buyung pun memberi nama-nama termasuk menteri yang terkait korupsi dan akhirnya SBY *me-resuffle* kabinetnya.

Demikian juga dengan desakan beberapa pihak untuk membubarkan aliran Ahmadiyah, Buyung pun menganjurkan agar desakan itu tidak dilaksanakan supaya tidak ada korban.

“Jadi Presiden SBY itu orang yang baik, pintar, mau berbuat, asal mendapat masukan yg tepat. Jadi orang yang memberi masukan kepadanya juga harus bersih, bisa berargumentasi dan alasannya tepat maka dia akan laksanakan,” tutur Buyung.

Sekalipun Presiden SBY terkesan ragu-ragu, tetapi menurutnya karena Presiden orang yang penuh pertimbangan. “Tapi bila orang-orang di dekatnya bisa memberi masukan yang tepat, komplit dan jelas, beliau akan laksanakan. Saya sudah alami itu. Beliau memang banyak pertimbangan, tapi bukan berarti beliau itu tidak berani bertindak,” tambahnya lagi.

Buyung memang sudah melalui perjalanan panjang dalam meniti karier dalam menegakkan keadilan, tetapi di usianya yang sudah menginjak 78 tahun ia tetap bersemangat. Apa prinsip hidupnya? “Kalau kita berjuang dengan idealisme, apapun itu tidak akan jadi masalah. Berangkat dari nol, lalu amblas, lalu mulai lagi, ya tidak apa-apa. Hidup ini harus punya cita-cita. Idealisme itu yang bisa membuat kita bergelora terus seperti api dalam sekam,” kata Buyung dengan mantap.

Hendrik